

Bentara

Keuskupan Maumere: Natal dengan Pangan Lokal

Oleh John Dami Mukese
PU SKH Flores Pos

Kado Natal Mgr. Gerulfus Kherubim Pareira, SVD kali ini diracik dengan cita rasa pangan lokal tanpa sambal dan bumbu-bumbu. Disajikan apa adanya. Polos, Lugas dan lugu. Rupanya Uskup Kherubim paham benar, bicara tentang kenyataan, tak perlu berputar-putar, dan juga tidak boleh dibungkus-bungkus.

Ajakan untuk kembali menghargai pangan lokal adalah warna dasar yang amat kuat memberi corak unik pada Surat Gambela Adven Uskup Kherubim. Dengan judul: "Adven sebagai saat menantikan kedatangan Cinta yang menyelamatkan", Uskup menghargai umatnya memaknai Natal sebagai anugerah Cinta cuma-cuma yang menyelamatkan. Namun Cinta yang menyelamatkan itu tidak boleh dinanti-nantikan dengan sikap pasif dan apatis. Cinta yang menyelamatkan itu harus dinanti-nantikan dengan aktif dan kreatif. Hanya dengan cara itulah adven menanti Cinta itu bakal menghasilkan buah-buah cinta yang bermanfaat bagi kehidupan bersama.

Menanti secara aktif dan kreatif itu Uskup kaitkan dengan aksi solidaritas yang sedang digelar dalam keuskupannya. Aksi Solidaritas Keuskupan itu meliputi Aksi Solidaritas Pembangunan, Aksi Solidaritas Pendidikan, Aksi Solidaritas Kesehatan, dan Aksi Solidaritas Kematian. Semua aksi solidaritas itu dicanangkan untuk mengatasi masalah-masalah pokok yang sedang dihadapi oleh umat dalam Keuskupan Maumere. Uskup meminta umatnya untuk berpartisipasi aktif dalam melaksanakan Aksi Solidaritas Keuskupan itu sebab buah-buah indah yang nyata dari menanti Cinta yang menyelamatkan itu.

Itulah isi utama pesan Adven dan sekaligus Kado Natal 2011 dari Uskup Kherubim. Untuk memberi cita rasa yang khas, Uskup meraciknya dengan satu isu yang amat aktual dan relevan dengan persoalan pokok dalam keuskupannya. Masalah kemiskinan dan rawan pangan, nama manis untuk momok kelaparan, merupakan masalah yang rutin di wilayah Maumere. Seperti di Ende, juga di Flotim. Dan daerah-daerah lain di Flores.

Untuk mengatasi masalah ini Uskup, beberapa waktu sebelumnya sudah mencanangkan satu gerakan yang disebutnya gerakan "membangun kedaulatan pangan". Umat Keuskupan Maumere harus membangun kedaulatan pangan untuk bisa keluar dari jajahan kemiskinan dan kelaparan. Menurut Uskup, kemiskinan dan kelaparan sudah merupakan satu bentuk kekerasan terhadap hak asasi manusia. Dengan kata lain, manusia sudah dijajah dan menjadi korban kekerasan-kemiskinan dan kelaparan. Untuk bisa bebas, manusia harus membangun satu kekuatan ekonomi yang berdaulat sehingga tidak begitu mudah dikalahkan oleh kemiskinan dan kelaparan.

Kedaulatan tersebut tidak perlu dicari di luar wilayah keuskupan. Umat keuskupan Maumere memiliki kedaulatan tersebut secara berlimpah. Hanya selama ini dilupakan atau tidak dimanfaatkan dengan baik. Itulah pangan lokal harta kekayaan terwaris. Pangan lokal harus diberi tempat dan kesempatan untuk dilahirkan kembali di bumi Maumere. Pangan lokal harus menjadi objek cinta yang dinanti-nantikan dengan rindu bersama sang Cinta Ilahi yang menyelamatkan itu. SELAMAT PESTA NATAL.

Senggol

- T kasus dana Bansos, Yosef Otu ditangkep di ara Frans Seda.
- Maksud hati larkan diri, apa daya Frans Seda tak restui.
- Tolak tambang, masyarakat NTB sandera kapal ferry di Selat Sape.
- Alarm untuk Pemprov dan Pemda se-NTT yang masih pro tambang.
- Tak puas dengan pemerintah, warga Desa Pape bongkar pipa air bersih untuk masyarakat Soa.
- Duh, sadis benar! Orang Soa tidak salah. Salam Damai Natal!

Om Toki

Opini

Penyelesaian Kecurangan Hukum dengan Akuntansi Forensik

Oleh Tan Kwang En
Dosen Program Magister Akuntansi
Universitas Kristen Maranatha

Maraknya kasus korupsi yang bermunculan di tanah air kita belakangan ini membuat saya tertarik untuk mencoba mencari penyelesaian lain, terutama untuk kasus-kasus kecurangan hukum. Tiga kategori utama kecurangan yaitu korupsi, aset misappropriation dan kecurangan laporan keuangan. Korupsi berkaitan dengan penggunaan pengaruh seseorang dalam transaksi bisnis yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang sehingga menguntungkan diri dan kelompoknya, misalnya suap. Istilah korupsi pada UU No. 31 tahun 1999 meliputi 30 tindak pidana korupsi. Beberapa di antaranya yang sering terjadi adalah *conflict of interest*, *bribery*, *illegal gratuities*, dan *economic extortion*. *Conflict of interest* atau benturan kepentingan sering ditemui dalam bentuk bisnis pejabat/pengusaha dan keluarga serta kroni-kroninya. *Bribery* atau penyupaan merupakan hal yang sering dijumpai dalam kehidupan bisnis dan politik di Indonesia. *Illegal gratuities*, pemberian atau hadiah yang merupakan bentuk tersembunyi dari penyupaan, hal itu juga sering dijumpai dalam kehidupan bisnis dan politik di Indonesia. *Economic extortion* merupakan ancaman terhadap rekanan. Ancaman ini bisa secara terselubung atau terbuka. Korupsi berdasarkan pendekatan psikologis adalah penyalahgunaan wewenang jabatan atau keuntungan pribadi. Korupsi bukan masalah budaya, akan tetapi korupsi berkenaan dengan masalah sistem perekonomian dan kelembagaan. Lingkaran perekonomian dan kelembagaan membentuk lingkup korupsi dan insentif untuk melakukan korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan di sektor pemerintahan untuk keuntungan pribadi, meliputi penjualan kekayaan negara secara tidak sah oleh pejabat, *kickbacks* dalam pengadaan di sektor pemerintahan, penyupaan, dan "pencucian" dana-dana pemerintah.

Asset Misappropriation adalah penyalahgunaan sumber daya suatu organisasi. Misalnya faktor yang salah, kecurangan pembayaran dan sebagainya. *Asset Misappropriation* atau pengambilan aset secara ilegal (tidak sah melawan hukum) yang dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut disebut *misappropriation*. *Asset Misappropriation* dalam bentuk penjarahan *cash* dilakukan dalam bentuk yaitu *skimming* (uang dijarah sebelum uang tersebut masuk ke perusahaan), *larceny* (uang dijarah sesudah uang tersebut masuk ke sistem/perusahaan), dan *fraudulent disbursements* (penggelapan aset).

Kecurangan laporan keuangan merupakan perilaku salah saji material dalam pencatatan keuangan perusahaan. Kecurangan pelaporan terdiri atas kecurangan laporan keuangan berkenaan dengan penyajian laporan keuangan dan kecurangan da-

lam menyusun laporan non keuangan. Kecurangan dalam menyusun laporan keuangan berupa salah saji, baik *overstatement* maupun *understatement*. Kecurangan dalam menyusun laporan non keuangan berupa penyampaian laporan non keuangan yang menyesatkan, lebih baik/bagus dari kondisi yang sebenarnya, pemalsuan/pemutarbalikan keadaan dapat tercantum dalam dokumen untuk keperluan intern maupun ekstern.

Kerugian Kecurangan

Kecurangan (*fraud*) merupakan masalah signifikan dan tidak dipahami oleh sebagian besar khalayak. Dampak kecurangan begitu masif, namun tidak banyak penelitian yang melakukan elaborasi mengenai berapa jumlah kerugian yang ditanggung, siapa yang melakukan dan siapa yang menderita kerugian. Karena natur kecurangan adalah disengaja, maka sangat sulit untuk menjawab pertanyaan itu.

Deteksi Kecurangan

Kecurangan tidak terjadi begitu saja, selalu ada pelakunya. Oleh karena itu, akuntan forensik harus menemukan petunjuk awal (*indicia of fraud*), akuntan forensik harus berspekulasi secara cerdas siapa yang berpotensi menjadi pelakunya atau otak pelakunya. Akuntan forensik harus fokus mengumpulkan bukti dan barang bukti untuk proses pengadilan, kreatif dalam menerapkan teknik investigatif. Akuntan forensik harus sadar bahwa kecurangan hanya bisa terjadi karena persekongkolan, sehingga akuntan forensik harus memiliki intuisi yang tajam untuk merumuskan teori persekongkolan. Akuntan forensik harus mengenali pola kecurangan sehingga dapat menerapkan teknik audit investigatif yang ampuh. Deteksi kecurangan mayoritas dapat dilakukan dari dalam. Akuntan forensik melakukan pemeriksaan dari dalam dan menggunakan pendekatan prosedural audit, sehingga lebih mudah mendeteksi daripada penyelidikan oleh kepolisian. Akuntan forensik bisa memberikan bantuan kepada kepolisian dalam penyelesaian kasus-kasus hukum.

Informasi apa saja yang dibutuhkan di Indonesia? Di antaranya adalah data berupa lama kecurangan berlangsung sebelum terungkap. Ini bergantung pada jenis *fraud*, yang paling pendek adalah *fraud* yang berkenaan dengan uang kas, yakni rata-rata 17 bulan dan yang paling panjang adalah penge-luaran cek secara tidak sah dan pembuatan laporan keuangan yang tidak benar, yakni rata-rata 30 bulan. Data ini bermanfaat bagi akuntan forensik, dan apabila ada indikasi *fraud*, maka akuntan forensik dapat

memeriksa atau mengumpulkan bukti dan barang bukti yang berhubungan dengan *fraud* sepanjang rata-rata bulan *fraud* terdeteksi. Informasi yang kedua adalah bagaimana *fraud* terungkap? *Fraud* biasanya sering terungkap karena ada petunjuk yang dilaporkan secara informal (*tip* atau *tip off*), *fraud* juga dapat terungkap secara kebetulan (*by accident*). Misalnya saja, *fraud* dilakukan oleh pemilik/majikan, biasanya yang banyak memberikan *tip* adalah pegawainya. Di Indonesia, hal tersebut juga terjadi dalam kasus manipulasi pajak Asian Agri oleh pegawai-nya Vincentinus Amin Sutanto. Diduga kuat ada manipulasi isi SPT pajak sepanjang tahun 2002-2005 sehingga negara kehilangan pajak penghasilan sebesar Rp1,3 Triliun. *Fraud* dapat dicegah dengan pengendalian yang bersifat pemberantasan terhadap *fraud* atau *anti-fraud controls*. Hal terpenting dalam pencegahan ini adalah penerapan *anti-fraud controls* menekankan efektifitas *anti-fraud controls* menekankan keraguan akibat *fraud*.

Apakah faktor penting yang mendukung terjadinya *fraud*? Faktor penting yang mendukung terjadi *fraud* adalah lemahnya atau tidak adanya pengendalian intern. Akuntan forensik harus mengetahui bahwa lemahnya atau tidak adanya pengendalian intern memudahkan oknum-oknum tertentu untuk bersekongkol melakukan kecurangan. Oleh karena itu, efektifitas pengendalian intern merupakan bagian yang penting untuk diinvestigasi saat melakukan prosedur audit. Siapakah pelaku *fraud*? Pelaku *fraud* dibagi menjadi tiga kelompok yaitu pemilik (eksekutif), manajer, dan karyawan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kecurangan biasanya dilakukan oleh orang dalam. Akuntan forensik harus dapat berspekulasi secara cerdas siapa yang berpotensi menjadi pelaku kecurangan atau otak pelaku kecurangan.

Sebagai simpulan, akuntansi forensik dapat membantu menyelesaikan kasus-kasus kecurangan hukum dengan:

- a. Membantu para penegak hukum untuk melakukan perhitungan dan pengungkapan kerugian kecurangan, meskipun di Indonesia masih terdapat banyak kendala, karena kecurangan seringkali dilakukan secara bersamaan sehingga sulit untuk memulainya dari mana akan diungkap.
- b. Akuntan forensik dapat mendeteksi penyebab terjadinya kecurangan. Ketiga kategori kecurangan di atas dapat menimbulkan kerugian bagi negara dan keuangan negara.
- c. Akuntansi forensik dapat menemukan petunjuk awal (*indicia of fraud*) terjadinya kecurangan, membantu

ke halaman 13

Panjang naskah "Opini" 1.000 hingga 1.500 kata disertai foto.